



Penerapan E- Government Melalui Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Berbasis Website Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato

Rustam Tohopi¹, Pebriyanto A. Hulinggi²

Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo,
rustam@ung.ac.id pebrihulinggi@ung.ac.id

Received : Dec 22, 2022; Accepted : April 21, 2023
DOI 10.25299/jiap.2023.vol9(1).11130

Abstract

The purpose of this study is to analyze the application of a government system (e-government) based on village websites by utilizing information and communication technology to achieve government accountability, transparency, effectiveness and efficiency of village governments in Lemito District. The type of research used in this study uses a qualitative approach which has natural characteristics (natural setting) as a direct data source, because a qualitative approach can reveal various kinds of facts and conditions that occur. Data collection techniques where researchers use various types of data collection where actions are carried out, namely observation (observation), interviews (interviews), documentation and triangulation (combination). Based on the results of research analysis in Lemito District, Pohuwato Regency, the implementation of e-government has not been carried out optimally, where it has not utilized what has become the policy expectation regarding the use of technology, information and communication related to transparency, accountability, effectiveness and efficiency of village government. The village government system in Lemito District still uses a manual system for public services without taking advantage of technological developments, in this case the village website. The existence of a system that is still completely manual results in slow service and is still left behind from the current developments in achieving electronic government.

Key Words: e-government, Technology policy, Public Service

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis penerapan sistem pemerintahan (e-government) berbasis website desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai akuntabilitas pemerintahan, transparan, efektif dan efisiensi pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Lemito. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimana menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, karena dengan pendekatan kualitatif bisa mengungkapkan berbagai macam fakta dan kondisi yang terjadi. Teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan macam-macam pengumpulan data dimana tindakan dilakukan yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan triangulasi (gabungan). Berdasarkan hasil analisis penelitian di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato bahwa penerapan e-government belum dilakukan secara maksimal dimana belum memanfaatkan apa yang sudah menjadi harapan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi terkait transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi pemerintah desa. Adapun sistem pemerintahan desa di Kecamatan Lemito masih menggunakan sistem manual untuk pelayanan publik tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam hal ini website desa. Adanya sistem yang masih serba manual mengakibatkan lambatnya pelayanan dan masih tertinggal dari perkembangan zaman yang ada dalam mencapai pemerintahan elektronik.

Key Words: e-government, Kebijakan Teknologi, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Adapun di era reformasi sekarang ini dimana keharusan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terbuka dalam segala hal termasuk juga pemerintah desa dalam mengelola organisasi pemerintahan desa. Pemerintah desa harus mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan menyampaikan secara terbuka terkait kebijakan publik yang berhubungan dengan kegiatan desa baik dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah harus mengikuti perkembangan jaman yang ada, dimana pemerintah diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi baru untuk mengoptimalkan urusan pemerintahan baik yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, program desa, pengelolaan keuangan, bentuk kerjasama desa, struktur desa, dan semua program desa yang perlu diketahui oleh publik terutama masyarakat yang ada di wilayah masing-masing desa.

Adapun pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana disebutkan pada pasal 12 poin (d) dengan tujuan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, juga disebutkan pada poin (e) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Hal yang sama juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelayanan publik dimana sudah dipertegas dalam peraturan tersebut bahwasanya untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang kompleks dan didukung adanya kemajuan teknologi, sehingga pemerintah Kabupaten Pohuwato dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

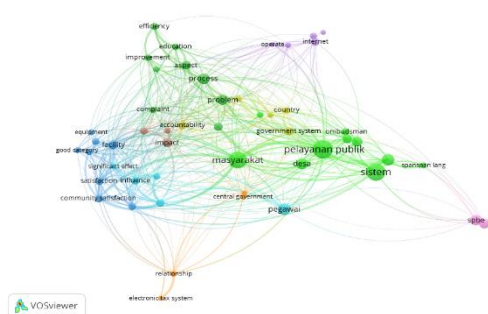
Sebelumnya juga sudah ada instruksi dari Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*, dengan tujuan bahwa pengembangan *e-government* menjadi sebuah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Adapun dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mempertimbangkan pelaksanaan pemerintahan dalam hal pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, juga disebutkan pada pasal 4 ruang lingkup rencana TIK meliputi pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi komunikasi yang meliputi a). Pengembangan SDM, b). Pengembangan infrastruktur jaringan komputer, dan c). pengembangan sistem aplikasi.

Selanjutnya diuraikan bahwa adanya manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam *e-government* yakni mampu meningkatkan pelayanan, membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat, membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, dan membantu kontribusi terhadap kebijakan (Mukhsin, 2020).

Sebelumnya penelitian ini akan menguraikan alasan untuk melakukan penelitian mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi dengan melihat peluang sebagaimana diperoleh dengan menggunakan peta *visualisasi network* dan peta *visualisasi density* yang ada dalam aplikasi *VOSviewer*. *VOSviewer* sebagaimana diungkapkan oleh Naukkarinen & Bragge, (2016) dalam (Rika et al., 2020:205) bahwa *VOSviewer* merupakan perangkat lunak *freeware* untuk membuat peta berdasarkan data yang kita pilih dan memvisualisasikan dalam bentuk peta. Sehingga jika dilihat dengan menggunakan Visualisasi network yang memuat tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

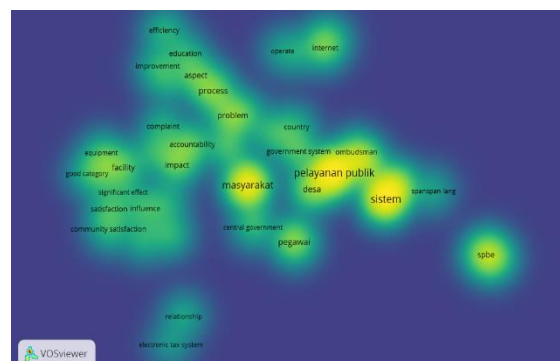
Gambar 1.
Hubungan Tema Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Sumber : Peta Visualisasi Network SPBE (2020-2022)

Dapat kita lihat bahwa yang berhubungan dengan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yaitu *process*, *government system*, pelayanan publik, masyarakat, pegawai (SDM), dan sistem. Adapun jika dilihat dengan menggunakan peta Visualisasi density terkait dengan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yakni seperti ada pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.
Konsep Dominan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Sumber : Peta Visualisasi Density SPBE (2020-2022)

Berdasarkan gambar yang ada dengan menggunakan Peta *Visualisasi Density* maka kita bisa melihat bahwa Sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam hal pelayanan publik belum banyak diteliti oleh banyak orang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan bahwasanya pemerintah desa tidak memanfaatkan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana hasil penelitian (Shafira & Kurniasiwi, 2021) dijelaskan bahwa dengan adanya penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo mampu meningkatkan pelayanan publik berbasis online secara efektif dan efisien, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kulon progo kurang memanfaatkan aplikasi yang sudah ada sehingga mengakibatkan penerapan *e-government* belum efektif. Selanjutnya penelitian terkait dengan "*Impact of Infrastructure Barriers on Electronic Government Implementation*" atau yang dimaksud dengan dampak infrastruktur terhadap implementasi *e-government*, dimana dalam penelitian dijelaskan bahwa *e-government* menjadi kebutuhan tertinggi

semua kantor administrasi, walaupun penggunaan *e-government* mengalami berbagai macam hambatan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh organisasi pemerintahan. Lanjut juga bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengenali berbagai macam hambatan infrastruktur yang bisa mempengaruhi pelaksanaan layanan *e-government* bisa menjadi catatan besar bagi organisasi untuk mencapai keberhasilan layanan kepada masyarakat secara online (Zeebaree et al., 2020).

Selanjutnya hasil penelitian (Arwati & Latif, 2021) menunjukkan bahwa ada hubungan antara transparansi keuangan dan akuntabilitas dalam menerapkan *e-government* sehingga dapat dipahami bahwa persoalan keuangan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dan juga bagi masyarakat perlu adanya peran aktif pemerintah dalam penggunaan sistem *e-government* sehingga masyarakat secara umum paham terkait tujuan yang diinginkan berdasarkan tuntutan zaman. Berdasarkan uraian hasil penelitian yang ada dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pemerintah akan semakin mudah dengan memanfaatkan teknologi berbasis elektronik.

Adapun yang menjadi permasalahan di Kecamatan Lemito sesuai dengan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan bahwasanya masing-masing pemerintah desa sudah berupaya menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menggunakan *Website* guna untuk mendukung jalannya sistem pemerintahan dalam hal pelayanan publik dan juga penyebaran informasi publik yang berhubungan dengan semua kegiatan desa, akan tetapi hal demikian sudah tidak berjalan lagi bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya

Website desa karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tingkat Pendidikan pelaksana yang belum mumpuni dalam mendukung penggunaan sistem sehingga sulit memanfaatkan teknologi yang ada, kurangnya motivasi ataupun penegasan dari pimpinan dalam hal ini Kepala desa untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik, beberapa desa yang masih sulit akses jaringan, kurangnya penegasan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan secara elektronik, dan juga pemerintah desa tidak melakukan perpanjangan atau pembayaran *domain* sehingga *Website* desa tidak bisa lagi diakses dan tidak bisa digunakan.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan analisis yang tepat untuk melihat penerapan *e-government* pada Pemerintah Desa Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Kecamatan Lemito merupakan bagian dari salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini tentunya pemerintah desa yang ada di Wilayah Kecamatan Lemito.

Tinjauan Pustaka

Kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam melayani setiap warga negara menjadi hal yang perlu diperhatikan dimana dengan tujuan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan dasar dan hak daripada penduduk sebagaimana sudah menjadi amanat dari Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelayanan publik dilakukan baik dalam bentuk barang maupun jasa pelayanan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, sehingganya kewajiban itulah yang menjadi tuntutan dasar dalam mencapai tujuan dari sebuah negara bahkan instansi yang memberikan

layanan. Adapun dengan perkembangan jaman yang ada dimana pemerintah perlu melakukan reformasi atau perubahan untuk mengefektifkan pelayanan menjadi lebih baik di kalangan publik.

Pelayanan menjadi lebih baik atau yang dikenal dengan *good governance* sebagaimana sudah tertuang pada sebuah kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat, daerah bahkan sampai pada tataran pemerintah desa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian atau kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal yang sama juga sudah tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelayanan publik dimana pada pasal 3 disebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, pelayanan administratif, dan pelayanan jasa publik.

Selanjutnya dengan mengetahui adanya kebijakan tentang pelayanan publik maka beberapa pendapat yang dikemukakan beberapa pakar tentang pelayanan publik sebagaimana pendapat Kotler yang dikutip oleh (Mahsyar, 2011:83) mengemukakan bahwa Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Adapun dalam pelayanan perlunya kualitas pelayanan publik sebagaimana lima dimensi kualitas pelayanan dikatakan Kotler dan Keller (2016) yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sehinganya dapat dipahami bahwa

dengan melihat lima dimensi yang ada untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan masyarakat (Wulansarai & Meirinawati, 2016:462).

Adapun pelayanan publik sebagaimana pendapat dari Mahmudi (2015) dimana dikatakan bahwa dalam pemberian pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik bisa memperhatikan asas pelayanan publik, yakni a) Transparansi pelayanan, c) Akuntabilitas Pelayanan, d) Kondisional Pelayanan, e) Partisipatif Pelayanan, f) Tidak Diskriminatif (Kesamaan Hak) Pelayanan, g) Keseimbangan hak dan kewajiban Pelayanan (Anisa et al., 2022:22). Adapun maksud dari pelayanan publik menurut Ramli (2013) yang dikutip oleh (Hidayat, 2017:49) merupakan pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan juga memiliki standar pelayanan dimana untuk mengukur dan perlu ditaati oleh penyelenggaraan layanan, adapun standar layanan dimaksud yaitu prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi petugas pemberi layanan, produk pelayanan, dan sarana prasarana layanan (Mukarom & Laksana, 2018:85). Dapat dipahami bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat memerlukan prosedur yang jelas agar bisa terarah dengan baik, biaya yang jelas sehingga penerima layanan tidak merasa terbebani dikarenakan mereka sudah mengetahui dan menerima informasi berapa biaya yang harus

dikeluarkan, perlu kompetensi petugas sehingga cepat dan tepat dalam memberikan layanan tanpa memandang keluarga dan kerabat, tidak hanya itu dalam pelayanan perlunya sarana maupun prasarana yang mendukung berjalannya aktivitas layanan. Dengan uraian yang ada maka akan tercapai harapan organisasi dan akan tercapai yang namanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencapai *Good Governance* yakni menerapkan sistem yang mudah dan cepat bagi masyarakat sebagaimana yang kita kenal yakni *New Public Service*, NPS merupakan sebuah langkah kerja dalam mencapai pelayanan yang baik seperti yang dikemukakan oleh Dernhart & Dernhart, (2003) bahwa *New Public Service* (NPS), yaitu sebuah kerangka kerja baru tentang layanan publik yang berorientasi pada masyarakat, aspiratif, dan demokratis (Wulandari & Suryanto, 2022:46). Maksudnya bahwa NPS lebih kepada kebutuhan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik dan bersifat demokratis.

Sebelum kita mengenal adanya *e-government* dimana kita perlu memahami adanya beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dikenal dengan *Sound Governance*, *Dynamic Governance*, dan *Open Governance*. Adapun pengertian *Sound governance*, Farazmand (2004:10-11) menjelaskan, *the concept of "sound governance" is used in this book as an alternative to the term good governance hence, the concept of "soundness" is used to characterize governance with superior qualities in functions, structures, processes, values, dimensions, and elements that are necessary in governing and administration* (Andhika, 2017:90).

Berikut *Dynamic governance*, menurut Neo dan Chen (2007) *In simple*

terms, dynamic Governance was a concept that adapts to conditions in various kinds of organizational situations that were uncertain and always changing, full of various kinds of challenges and obstacles experienced by these organizations (Zakiah & Suprayogi, 2020:60). Maksudnya bahwa tata kelola dinamo merupakan sebuah konsep yang menyesuaikan diri dengan kondisi di berbagai situasi dalam organisasi yang tidak pasti dan selalu berubah, penuh dengan berbagai macam tantangan dan hambatan yang akan dialami oleh organisasi.

Selanjutnya Wirtz dan Birkmeyer (2015) mendefinisikan *open government* sebagai *a multilateral, political and social process, which includes in particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration* (Andhika, 2017:92). Maksudnya bahwa pemerintahan terbuka sebagai proses multilateral, politik dan sosial, yang termasuk khususnya transparan, kolaboratif dan tindakan partisipatif oleh pemerintah dan administrasi, sehingga di dapat dipahami bahwa Pemerintahan terbuka merupakan tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Adapun pendapat Idrajit, (2002) dimana dikatakan bahwa *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara interaktif, efektif dan efisien (Fatchuriza & Prasajo, 2021:48). Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara elektronik dengan tujuan untuk pelayanan publik secara efektif kepada masyarakat penerima jasa pelayanan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato yaitu menggunakan pendekatan kualitatif

yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, karena dengan pendekatan kualitatif bisa mengungkapkan berbagai macam fakta dan kondisi yang terjadi. Sehingga pendekatan ini lebih memungkinkan untuk mengangkat fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang situasi dan keadaan dari suatu fenomena yang terjadi.

Adapun yang dikemukakan Sutopo and Arief, 2010 merupakan penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, persepsi, sikap, dari setiap individu maupun kelompok (Simarmata, dkk, 2021:70). Selanjutnya Menurut Denzin & Lincoln (1994) (dalam Anggito & Setiawan, 2018:7) dimana dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hal yang sama juga disampaikan oleh Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow (2002) penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan *focus group*, *interview* secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data (Sugiyono, 2017:40).

Hasil dan Pembahasan

Sistem pemerintahan yang baik adalah sistem yang digunakan untuk mengedepankan kepentingan publik, seperti yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini dimana melihat penerapan *e-government* yang sekarang ini kita ketahui bersama bisa memudahkan pemerintah dalam melakukan aktivitas dalam organisasi guna untuk mencapai tujuan kelompok orang atau tujuan organisasi. Dalam penerapan *e-government* sudah jelas tertera dalam beberapa kebijakan salah satunya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pohuwato mengenai *good governance*. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No 59 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi informasi dan komunikasi, disebutkan bahwa dalam mencapai pemerintahan yang baik maka perlu melakukan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan, beberapa hal sebelumnya disebutkan menjadi jaminan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Transpransi

Hasil penelitian di Kecamatan Lemito bentuk transparansi sudah dilakukan oleh pemerintah desa, hanya saja masih menggunakan sistem manual atau sistem lama dimana dengan memasang baliho terkait rincian anggaran dan program-program desa, memberikan informasi kepada masyarakat melalui rapat-rapat desa, pemerintah desa tidak memanfaatkan *website* desa sebagai media *online*, adapun media *online* yang digunakan oleh pemerintah desa hanya *facebook* dan *youtube*, adapun yang dipublikasikan hanya kegiatan-kegiatan desa tanpa mempublikasikan laporan-laporan desa secara administrasi apalagi mengenai pengelolaan keuangan desa.

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh Hoesada (2019) bahwa adanya asas transparan yang mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah

diakses para pemangku kepentingan di desa (Mais & Palindri, 2020). Sama halnya disampaikan oleh Agus Dwiyanto, (2009) bahwa transparansi merupakan bagian dari pelayanan publik dan menjadi bagian dari praktik *good governance* (Bays Dessyana, 2022:2). Jelas apa yang diungkapkan oleh beberapa para ahli sebelumnya yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi mengenai transparansi itu sendiri dan dengan sendirinya dapat mencapai pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pendapat yang ada dan melihat hasil penelitian di peroleh lapangan dimana peneliti memberikan pandangan bahwasanya Pemerintah Desa sudah menerapkan sistem transparansi, hanya saja yang menjadi kendala dimana ini belum dilakukan atas dasar perkembangan zaman yang sudah serba teknologi dan belum melakukan perubahan dengan memanfaatkan *website* desa, sehingga bentuk transparansi belum mencapai pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas

Terkait akuntabilitas bahwa pemerintah desa sudah bertanggung jawab atas semua kegiatan desa, seperti membuat laporan kegiatan desa beserta anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan, selanjutnya disampaikan kepada masyarakat pada saat rapat, hanya saja ini belum memanfaatkan *website* desa yang sudah ada di masing-masing desa, sehingga masyarakat sulit memperoleh laporan pertanggung jawaban kepala desa.

Pendapat yang dikemukakan oleh Brenton, 2014; & Northcott (2018) bahwa akuntabilitas merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh pejabat publik untuk memberikan informasi dan penjelasan atas tindakan dan perilaku yang dilakukan (Imawan et al., 2019:161). Selanjutnya Wahyudi (2010) dalam (Kusrawan et al.,

2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Adapun pendapat yang ada dapat dipahami bahwa memang penggunaan teknologi informasi komunikasi akan berdampak positif pada bentuk akuntabilitas pemerintah dalam hal ini pemerintah desa utamanya dalam pengelolaan pemerintahan.

Sesuai dengan uraian sebelumnya jika disandingkan dengan hasil penelitian dimana yang menjadi kekurangan pemerintah desa yang ada di Kecamatan lemito adalah tidak memanfaatkan teknologi dalam hal ini website desa untuk menerapkan bentuk akuntabilitas sehingga akan mencapai pemerintahan yang baik. Adapun tujuan pemanfaatan website desa guna untuk memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat dan dengan sendirinya akan lahir pengawasan dari masyarakat sendiri kepada pemerintah desa dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Efektivitas

Adapun hasil penelitian mengenai pelayanan di Desa belum efektif karena masih menggunakan sistem manual, selain itu terkait pelayanan administrasi masih membutuhkan waktu dan biaya, selain itu yang menjadi kendala dimana masyarakat masih sulit menerima sistem pelayanan secara online, dikatakan juga bahwa ketika pelayanan di alihkan ke sistem online maka perlu dilakukan sosialisasi.

Adapun untuk mengukur efektivitas pelayanan publik sebagaimana dikatan Duncan yang dikutip oleh Steers (2012) dimana terdapat tiga aspek yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Hertati et al., 2021:208). Selanjutnya dikatakan oleh Mahmudi, (2005) bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. (Muhammad & Dede, 2022:2248). Dengan memahami beberapa pendapat yang ada bahwa efektifitas dari sebuah organisasi disebabkan adanya tujuan organisasi yang sudah tercapai, terintegrasinya dengan cepat dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan teori yang ada dan jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di Lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah desa belum melakukan perubahan yang besar untuk pembangunan desa, mereka masih cenderung menggunakan sistem pemerintahan lama dimana belum memanfaatkan teknologi dalam hal ini website desa untuk pelayanan sehingga bisa mencapai efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Efisien

Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang ada di Wilayah Kecamatan Lemito, dimana dapat diuraikan bahwa pelayanan di Desa belum efisien disebabkan pelayanan yang masih serba manual, adapun yang menyebabkan hal demikian terjadi diakibatkan kurangnya kreativitas pemerintah desa dalam merubah sistem pelayanan kepada masyarakat, kegiatan pelayanan masih membutuhkan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat desa. Permasalahan yang ditemui di Lapangan dapat dipahami bahwa belum tercapainya tujuan kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

Maksud dari efisien ialah tindakan pemerintah desa dalam meminimumkan biaya dalam penggunaan sumberdaya sebagaimana sebelumnya pengeluaran

yang sudah ditetapkan. Maksud lain juga bisa dikatakan bahwa lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran akan tetapi tujuan sudah tercapai dengan baik. Sama halnya dikatakan oleh Halim (2001) bahwa efisiensi merupakan sebuah perbandingan antara output dan input (Kus, 2021:28). Selanjutnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi desa guna untuk mewujudkan kinerja pemerintah desa yang efisien. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sirait (2007) tujuan pemerintah mengaplikasikannya guna mewujudkan kinerja pemerintah yang bersih dan efisien (Akay et al., 2021:2).

Adanya pendapat atau teori yang sudah di uraikan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa pemerintah desa belum memanfaatkan website desa sehingga belum mencapai efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah desa sendiri mengenai pengelolaan pemerintahan.

Kesimpulan

Menurut Zainal Abidin (2012) mendefinisikan *e-government* dimaknai dengan suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah (Harianja, 2020:56). Dapat kita pahami bahwa dalam pelaksanaan praktek *e-government* dimana pengguna internet dalam pelaksanaan urusan pemerintahan melakukan penyediaan layanan publik secara efektif dan efisien dimana lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan *e-government* belum dilakukan secara maksimal dimana

belum memanfaatkan apa yang sudah menjadi harapan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi terkait transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi pemerintah desa. Adapun sistem pemerintahan desa di Kecamatan Lemito masih menggunakan sistem manual untuk pelayanan publik tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam hal ini website desa.

Adapun yang menjadi saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dimana perlunya inovasi dalam hal pelayanan dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Lemito, guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan dalam hal administrasi desa, selanjutnya mampu memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan kebijakan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Daftar Pustaka

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Andhika, L. R. (2017). *Sound Governance , Dynamic Governance , Dan Open Governement (Comparative Concept of Governance : Sound Governance , Dynamic Governance , And Open Government)*. 87–102.
- Anisa, S., Erlianti, D., & Jannah, D. (2022). Analisis Asas Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. 4(1), 20–24.
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2021). *To Investigate the Relationship Between Financial Transparency and Accountability Based on Students Perceptions in Implementation of E Government: A Study on Bandung City , Indonesia*. 11(1), 547–551. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.1.38>
- Bays Dessyana, F. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parseba Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Bays Dessyana Falangi. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(126), 1–9.
- Fatchuriza, M., & Prasojo, T. A. (2021). Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal. 6(1), 45–53.
- Harianja, H. (2020). Analisis Kebijakan Publik Dalam Penerapan E-Government Binjai SmartCity. 54–60.
- Hertati, D., Vandayani, D. S., & Ainy, D. . S. (2021). Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik Bus Damri Angkutan Pemadu Moda Rute Mojokerto-Bandara Juanda. 4(1), 204–214. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.18086>
- Hidayat, W. (2017). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang. 3(1).
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekono>

- mi.v12i1.139
- Kusrawan, K., Liswatin, L., & Haris, T. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2767–2773. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780>
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. In *Jurnal Akuntansi dan Governance* (Vol. 1, Nomor 1, hal. 57). Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Muhammad, F. A., & Dede, N. (2022). Efektivitas Penyediaan Internet Desa untuk Peningkatan Promosi UMKM di Temenggungan Udanawu Blitar. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(9), 2245–2258.
- Mukhsin. (2020). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7–15. [http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.78-87 Peranan Teknologi Informasi.pdf](http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.78-87%20Peranan%20Teknologi%20Informasi.pdf)
- Rika, W., Rochima, E., Rianto, Y., & Endayana, C. (2020). *Pemetaan Topik Nilai Publik dalam Penelitian*. 42(2), 203–213.
- Shafira, A., & Kurniasiwati, A. (2021). *Implementasi E- Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo*. 5(1), 52–68.
- Wulandari, P., & Suryanto. (2022). *Analisis Determinan Kompetensi Pegawai Terhadap Implementasi New Public Service di Kabupaten Lamongan*. 6(1), 43–61.
- Wulansarai, N., & Meirinawati. (2016). *Kualitas Pelayanan Pengiriman POS Kilat Khusus di PT. Pos Indonesia Kebonrojo Surabaya*. 10(2), 457–470.
- Zakiah, N., & Suprayogi, Y. (2020). *Dynamic Governance Strategy in Pollution and Damage Control Patterns in the citarum Riverside (DAS)*. 5(2), 56–71.
- Zeebaree, M., Sattar, S., Qader, A., & Aqel, M. (2020). *Impact Of Infrastructure Barriers On Electronic Government Implementation*. 38(3), 1–15. <https://doi.org/10.25115/eea.v38i3>